



Juhanperak
e-issn : 2722-984X
p-issn : 2745-7761

PENGARUH KEJELASAN SASARAN ANGGARAN, PENERAPAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK, PENGENDALIAN AKUNTANSI DAN KETAATAN PADA PERATURAN PERUNDANGAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI (Studi Empiris pada Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Kuantan Singingi)

PEBRI ASARI PUTRA

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi, Jl. Gatot Subroto KM 7, Kebun Nenas, Teluk Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi.
email: febrifauzii96@gmail.com

Abstract

This study aims to examine the effect of clarity of budget targets, the application of public sector accounting, accounting controls and compliance with laws and regulations on the performance accountability of OPD in the preparation of the Performance Accountability Report for Government Agencies of Kuantan Singingi Regency. This research was conducted at offices / agencies in the Kuantan Singingi Regency which is located in the Kuantan Singingi Regency Government Complex, totaling 26 offices / agencies. The population and sample in this study were the Head of Subdivision of Finance and Accounting Staff. This research is a survey research with 2 respondents per agency so that the number of respondents is 52 people. Data collection was carried out by distributing 52 questionnaires to 26 agencies / offices in Kuantan Singingi Regency. Determination of the sample using purposive sampling method. This research uses multiple linear regression analysis model with SPSS 21 software. The results of this study indicate that the effect of clarity of budget targets, the application of public sector accounting, accounting controls and compliance with laws and regulations simultaneously has a significant effect on the performance accountability of OPD in the preparation of the Performance Accountability Report of Local Government Agencies in Kuantan Singingi Regency. And partially the clarity of budget targets, the application of public sector accounting, control of accounting and compliance with laws and regulations have a significant effect on the performance accountability of government agencies in Kuantan Singingi Regency.

Keywords: *clarity of budget objectives, application of public sector accounting, accounting controls, compliance with laws and regulations, OPD Performance in Preparing the Performance Accountability Report of Government Agencies.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kejelasan sasaran anggaran, penerapan akuntansi sektor publik, pengendalian akuntansi dan ketaatan pada peraturan perundangan terhadap akuntabilitas kinerja OPD dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi. Penelitian ini dilakukan pada dinas/instansi yang berada di lingkungan Kabupaten Kuantan Singingi yang terletak di Kompleks Pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi yang berjumlah 26 dinas/instansi. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah Kasubbag Keuangan dan Staf Pencatat Keuangan/Akuntansi. Penelitian ini merupakan penelitian survei dengan



Juhanperak
e-issn : 2722-984X
p-issn : 2745-7761

responden yaitu 2 orang tiap instansi sehingga jumlah responden sebanyak 52 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan membagikan 52 kuesioner pada 26 instansi/dinas di Kabupaten Kuantan Singingi. Penentuan sampel dengan menggunakan metode purposive sampling. Penelitian ini menggunakan model analisis regresi linier berganda dengan software SPSS 21. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh kejelasan sasaran anggaran, penerapan akuntansi sektor publik, pengendalian akuntansi dan ketaatan pada peraturan perundangan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja OPD dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Dan secara parsial Kejelasan Sasaran Anggaran, Penerapan Akuntansi Sektor Publik, Pengendalian Akuntansi dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.

Kata Kunci: Kejelasan Sasaran Anggaran, Penerapan Akuntansi Sektor Publik, Pengendalian Akuntansi, Ketaatan Pada Peraturan Perundangan, Kinerja OPD Dalam Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

1. PENDAHULUAN

Anggaran sektor publik berisi rencana kegiatan yang dipresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Peranan anggaran pada suatu perusahaan merupakan alat untuk membantu manajemen dalam pelaksanaan, fungsi perencanaan, koordinasi, pengawasan dan pedoman kerja dalam menjalankan perusahaan untuk tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Halim dan Kusufi (2016:48) Anggaran adalah dokumen yang berisi estimasi kinerja, baik berupa penerimaan dan pengeluaran, yang disajikan dalam ukuran moneter yang akan dicapai pada periode waktu tertentu dan menyertakan data masa lalu sebagai bentuk pengendalian dan penilaian kinerja.

Sedangkan Menurut Mardiasmo (2011:61) Anggaran adalah pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Sedangkan menurut M. Nafarin (2012:19) Anggaran adalah rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang.

Dari beberapa definisi diatas dapat penulis simpulkan bahwa anggaran merupakan rencana operasi keuangan suatu organisasi yang diwujudkan dalam bentuk finansial dan disusun secara sistematis untuk periode waktu tertentu yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan dan sumber pendapatan yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran tersebut.

Menurut Bastian (2010:6) Akuntansi Sektor Publik adalah mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya,



Juhanperak
e-issn : 2722-984X
p-issn : 2745-7761

pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM dan yayasan sosial pada proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta.

Selanjutnya menurut Halim (2012:3) Akuntansi Sektor Publik adalah suatu proses pengidentifikasi, pengukuran, pencatatan dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu organisasi atau entitas publik seperti pemerintah, LSM, dan lain-lain yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka mengambil keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan.

Berdasarkan defenisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa Akuntansi Sektor Publik merupakan mekanisme teknik, alat informasi akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat informasi baik bagi pemerintah sebagai manajemen maupun alat informasi bagi publik.

Menurut Bastian (2010:385) Akuntabilitas Publik adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab, menerangkan kinerja, dan tindakan seseorang atau badan hukum dan pimpinan kolektif atau organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Menurut SK Kepala LAN no.239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Pedoman Penyusunan dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih telah mendorong pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas, tepat, teratur, dan efektif yang dikenal dengan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP). Penerapan sistem tersebut bertujuan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bertanggungjawab dan bebas dari praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme.

Terkait permasalahan tersebut beberapa penelitian telah dilakukan, diantaranya : Cefrida (2014) menemukan bahwa variabel kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kota Pekanbaru. Sedangkan hasil penelitian yang berbeda ditemukan oleh Haspiarti (2012) membuktikan bahwa kejelasan sasaran anggaran tidak mempunyai pengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kota Parepare.

Dalam penelitian Pamungkas (2012) ditemukan bahwa variabel penerapan akuntansi sektor publik berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Sedangkan Cefrida (2014) tidak



menemukan pengaruh variabel penerapan akuntansi sektor publik terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kota Pekanbaru.

Herawati (2011) menemukan bahwa variabel pengendalian akuntansi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kota Jambi, sedangkan Cefrida (2014) mengatakan variabel pengendalian akuntansi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Pekanbaru dan Wahyuni (2012) mengatakan variabel pengendalian akuntansi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Rohul.

penelitian Surya (2016) tentang Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Penerapan Akuntansi Sektor Publik, Pengendalian Akuntansi Dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Hasil penelitian Surya menunjukkan bahwa pengaruh kejelasan sasaran anggaran, penerapan akuntansi sektor publik, pengendalian akuntansidan ketaatan pada peraturan perundangan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja OPD dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Inhu. Sedangkan, secara parsial ketaatan pada peraturan perundangan tidak berpengaruh terhadap kinerja OPD dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Inhu, pengaruh kejelasan sasaran anggaran, penerapan akuntansi sektor publik, dan pengendalian akuntansi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kinerja OPD dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Inhu.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini diberi judul “**Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Penerapan Akuntansi Sektor Publik, Pengendalian Akuntansi, dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi**”.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Kejelasan Sasaran Anggaran

Nafarin (2013:11) Anggaran (budget) merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan dalam suatu uang, tetapi dapat juga dinyatakan dalam satuan barang/jasa.

Pengertian Anggaran Pemerintah Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Anggaran pemerintah merupakan dokumen formal hasil kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang belanja yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan pemerintah dan



Juhanperak
e-issn : 2722-984X
p-issn : 2745-7761

pendapatan yang diharapkan untuk menutupi keperluan belanja tersebut atau pembiayaan yang diperlukan bila diperkirakan akan terjadi defisit atau surplus.

2.1.2 Penerapan Akuntansi Sektor Publik

Menurut Bastian (2010:3) Akuntansi Sektor Publik adalah mekanisme teknis dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen dibawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM dan yayasan sosial, maupun pada proyek-proyek kerjasama sektor publik serta swasta.

Menurut Nordiawan (2010:35) Akuntansi Sektor Publik adalah proses pencatatan, pengklasifikasian, penganalisisan dan pelaporan transaksi keuangan dari suatu organisasi publik yang menyediaka informasi keuangan bagi para pemakai laporan keuangan yang berguna untuk pengambilan keputusan.

2.1.3 Pengendalian Akuntansi

Menurut definisi, pengendalian akuntansi mengasumsikan bahwa telah ditetapkan suatu rencana tindakan atau standar untuk mengukur prestasi pelaksanaan kegiatan. Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bagi perusahaan, pengendalian harus dikembangkan sehingga dapat diambil keputusan yang sesuai dengan rencana (Mulyadi, 2008).

Pengendalian dan laporan akuntansi mengenai operasi merupakan bagian dari rencana yang terpadu dengan baik untuk memelihara efisiensi dan menetapkan penyimpangan atau *trends* yang tidak memuaskan. Semakin tinggi derajat desentralisasi, maka semakin besar kebutuhan institusi induk terhadap pengendalian akuntansi untuk mengontrol, mengevaluasi aktivitas dan tanggungjawab yang didelegasikan. Dengan demikian, maka desentralisasi mempunyai kecenderungan untuk meningkatkan pengendalian akuntansi.

2.1.4 Ketaatan Pada Peraturan Perundangan

Keuangan Negara yang dikelola dalam pemerintahan, harus dipertanggung jawabkan sesuai dengan amanah konstitusi. Pelaksanaan fungsi ini di Indonesia diatur didalam UUD 1945 pasal 23 ayat 5 dan Undang-undang APBN. Pemerintah diharuskan membuat pertanggungjawaban keuangan negara tersebut merupakan bagian dari akuntabilitas publik yang harus disampaikan oleh pemerintah atas penggunaan keuangan negara yang diperoleh dari keuangan rakyat dan tujuan kesejahteraan rakyat.

Indikator untuk mengukur ketaatan pada peraturan perundangan adalah 1) "Tertib administrasi" yang terdapat dalam PP Nomor 53 tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil 2) "Prinsip efisiensi" sebagaimana yang disebutkan dalam PP No.23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum



3) Pengawasan tugas, 4) Perlakuan hukum. Dalam penelitian ini penulis menggunakan kuesioner yang digunakan oleh Oktiandra S (2010) dalam penelitiannya.

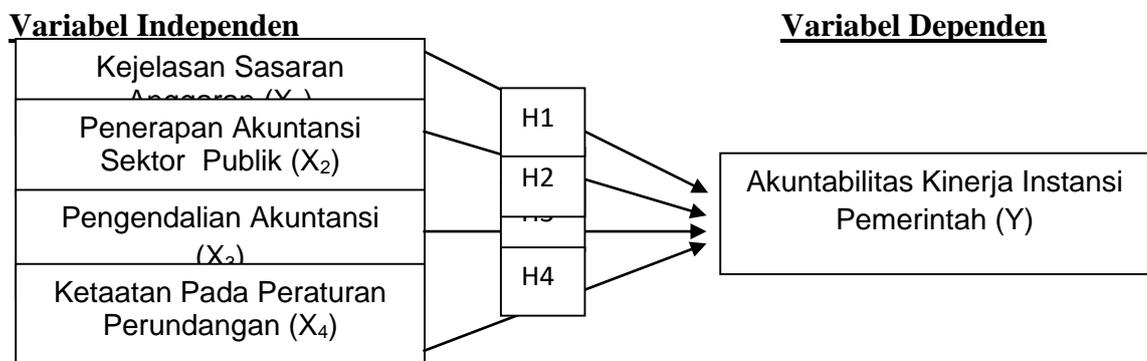
2.1.5 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban (LAN 2011).

Menurut Bastian (2010:385) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab, menerangkan kinerja, dan tindakan seseorang atau badan hukum dan pimpinan kolektif atau organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

2.2 Model Penelitian

Gambar II.1
Model Penelitian



Sumber: Yunita Surya (2016)

2.3 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah dapat dilakukan hipotesis sebagai berikut:

- H₁: Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- H₂ : Penerapan akuntansi sektor publik berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.



- H₃: Pengendalian akuntansi berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- H₄: Ketaatan pada peraturan perundangan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kausal dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian kausal adalah penyelidikan empiris yang sistematis dimana peneliti tidak mengendalikan variabel bebas secara langsung karena eksistensi dari variabel tersebut Emzir (2020:119). Hubungan kausal adalah hubungan yang bersifat sebab akibat. Jadi variabel bebas/ independen (variabel yang mempengaruhi) dan (variabel yang dipengaruhi) adalah variabel terikat/ dependen Sugiyono (2014:93). Dalam penelitian ini akan menggambarkan pengaruh kejelasan sasaran anggaran, penerapan akuntansi sektor publik, pengendalian akuntansi dan ketaatan pada peraturan perundangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer yang merupakan data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli yaitu menggunakan kuisioner. Data tersebut berasal dari jawaban responden atas kuisioner yang dibagikan kepada responden dalam hal ini semua satuan kinerja instansi pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi. Sumber data penelitian ini adalah skor yang diperoleh dari pengisian kuisioner yang telah dikirim kepada satuan kinerja instansi pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

3.3 Teknik pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah diperoleh melalui penelitian lapangan dengan menggunakan penyebaran kuesioner, yaitu daftar pertanyaan terstruktur yang diajukan pada responden. Langkah yang diambil untuk mengantisipasi rendahnya tingkat responden adalah dengan cara mengantar langsung kuesioner tersebut dan juga menghubungi kembali responden guna memastikan bahwa kuesioner yang telah diantar telah diisi oleh responden, setelah itu dikumpulkan kembali dengan menjemputnya langsung.

Penelitian ini menggunakan instrument berupa kuesioner dengan pernyataan tertutup. Kuesioner tertutup merupakan kuesioner dengan jawaban yang sudah disediakan oleh penyusun kuesioner. Pernyataan-pernyataan pada angket tertutup dibuat dengan skala Likert 1-5 dengan menggunakan pernyataan berskala



(*scaling question*). Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau kelompok orang tentang fenomena sosial. Dalam penelitian fenomena sosial ini telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti, yang selanjutnya disebut sebagai variabel penelitian. Jawaban setiap item instrument yang menggunakan skala Likert mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif.

a. Uji Kualitas data

1. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner agar data yang diperoleh bisa relevan atau sesuai dengan tujuan uji validitas yang digunakan dengan menghitung korelasi antara skor masing-masing butir pernyataan dengan skor setiap konstruksinya. Pengujian ini menggunakan metode *Pearson Correlation*, data dikatakan valid apabila korelasi antar skor masing-masing butir pernyataan dengan total skor setiap konstruksinya signifikan pada level 0,50 dalam Ghozali (2011).

2. Uji Reabilitas

Untuk uji reliabilitas instrument, semakin dekat koefisien keandalan, maka akan semakin baik. Keandalan konsistensi antar item atau koefisien dapat dilihat pada tabel *Cronbach's Alpha*. Untuk menguji realibitas instrument, semakin dekat koefisien keandalan dengan 1,0 maka akan semakin baik. Nilai reabilitas dinyatakan reliabel jika mempunyai nilai *Cronbach's Alpha* dari masing-masing instrument yang dikatakan valid jika (r_i) > 0,60 dalam Ghozali(2011).

b. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk melakukan pengujian apakah data memiliki pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau mendekati normal dengan melihat normal *probability plot*. Jika diasumsikan bahwa uji t dan F mengasumsikan nilai residual distribusi normal, jika ini dilanggar maka model regresi dianggap tidak valid dengan jumlah sampel yang ada. Ada dua cara yang dapat digunakan dalam menguji normalitas model regresi yaitu dengan analisis grafik (normal *probability plot*) dan analisis statistik (analisis Z skor *skewness* dan *kurtosis*) *One Sample Kolmogorov-Smirnov Test*.

2. Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas adalah situasi adanya korelasi variabel-variabel bebas di antara satu dengan yang lainnya, maka salah satu variabel bebas tersebut dieliminir. Untuk menguji adanya multikolinearitas dilakukan dengan melihat nilai VIF (*Variance Inflating Factor*) < 10 dan *tolerance* > 0,10.



3. Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas merupakan jenis pengujian yang bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi, terjadi ketidaksamaan varians dan residual dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Jika varians residual dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya tetap maka disebut *homoskedastisitas* dan jika varians berbeda disebut *heteroskedastisitas*. Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk mendekteksi ada tidaknya ketidaksamaan varians dari residual atau *heteroskedastisitas* yaitu dengan melihat *Scatter Plot* (nilai prediksi variabel dependen dengan residualnya).

3.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan teknik analisis regresi berganda yang dibantu oleh program SPSS 21. Regresi linier berganda bertujuan untuk mengetahui hubungan fungsional antara variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau analisis regresi digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Adapun bentuk persamaan regresi berganda dalam penelitian ini adalah :

$$Y = \alpha + B_1X_1 + B_2X_2 + B_3X_3 + B_4X_4 + \varepsilon$$

dimana :

Y	= Akuntabilitas Kinerja Instansi
α	= Konstanta
$B_1, B_2, B_3, B_4,$	= Koefisien regresi
X_1	= Kejelasan Sasaran Anggaran
X_2	= Penerapan Akuntansi Sektor Publik
X_3	= Pengendalian Akuntansi
X_4	= Ketaatan Pada Peraturan Perundangan
ε	= standar error

3.5 Pengujian Hipotesis

a. Pengujian secara simultan (uji-F)

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama atau simultan mempengaruhi variabel dependen. Uji F-test dengan tingkat signifikan p-value 0,000 atau α (5% atau 0,05).

1. Jika nilai signifikan $F \leq 5\%$ maka hipotesis diterima berarti variabel independen secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.
2. Jika nilai signifikan $F > 5\%$ maka hipotesis ditolak berarti variabel independen secara bersama-sama tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.



b. Pengujian secara parsial (uji-t)

Uji statistik t pada dasarnya untuk menguji secara individu variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan signifikan level 0,05 ($\alpha=5\%$).

1. Jika nilai signifikan $t > 0,05$ maka hipotesis ditolak. Ini berarti bahwa secara parsial variabel independen tersebut tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.
2. Jika nilai signifikan $t \leq 0,05$ maka hipotesis diterima. Ini berarti secara parsial variabel independen tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

3.6 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) mengukur berapa besar kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen dalam Ghozali (2011). Semakin R^2 mendekati satu maka variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Sebaliknya, jika nilai R^2 semakin kecil maka kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi dependen sangat terbatas.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran (X_1) Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Hasil uji pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hal ini ditunjukkan oleh nilai probabilitas t hitung untuk variabel kejelasan sasaran anggaran sebesar 2,501 dengan tingkat signifikan 0,016. Nilai signifikansi kurang dari 0,05 ini menunjukkan variabel kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Maka dapat disimpulkan H_1 diterima. Artinya, kejelasan sasaran anggaran berperan penting dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Kejelasan sasaran anggaran menunjukkan bahwa semakin jelas sasaran anggaran suatu daerah, maka akan mempermudah untuk mempertanggungjawabkan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Adanya sasaran anggaran yang jelas maka akan mempermudah aparat untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas organisasi dalam rangka untuk mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran



Juhanperak
e-issn : 2722-984X
p-issn : 2745-7761

yang telah ditetapkan sebelumnya. Pada konteks pemerintah daerah, kejelasan sasaran anggaran berimplikasi pada aparat untuk menyusun anggaran sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai instansi pemerintah. Ketidakjelasan sasaran anggaran dapat menimbulkan ketidakpastian atau keragu-raguan para pelaksana. Maka dapat disimpulkan, bahwa kejelasan sasaran anggaran yang semakin baik dapat memberikan pengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian terdahulu Mentari Cefrida (2014) yang menyimpulkan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Daerah Kota Pekanbaru. Selain itu, penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni (2012) yang menyimpulkan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.

b. Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik (X₂) Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Hasil uji pengaruh penerapan akuntansi sektor publik terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah menunjukkan bahwa penerapan akuntansi sektor publik berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hal ini ditunjukkan oleh nilai probabilitas t hitung untuk variabel penerapan akuntansi sektor publik sebesar sebesar 2,258 dengan tingkat signifikan 0,029. Nilai signifikansi kurang dari 0,05, ini menunjukkan variabel penerapan akuntansi sektor publik berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Maka dapat disimpulkan H₂ diterima. Ini artinya penerapan akuntansi sektor publik yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah berperan penting dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Penerapan akuntansi sektor publik memberikan sumbangan bagi peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam hal penyajian informasi pertanggungjawaban mengenai tujuan, fungsi dan obyek pengeluaran. Dengan demikian penerapan akuntansi sektor publik yang baik akan mengutarakan dengan jelas aliran dana masyarakat yang dikelola oleh sektor publik, sehingga akan menunjang akuntabilitas kinerja pada instansi pemerintah.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian terdahulu Pamungkas (2012) yang menyimpulkan bahwa penerapan akuntansi sektor publik berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mentari Cefrida (2014) yang menyimpulkan bahwa penerapan akuntansi sektor publik tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Daerah Kota Pekanbaru.



c. Pengaruh Pengendalian Akuntansi (X₃) Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Hasil uji pengaruh pengendalian akuntansi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah menunjukkan bahwa pengendalian akuntansi berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hal ini ditunjukkan oleh nilai probabilitas t hitung untuk variabel pengendalian akuntansi sebesar 3,536 dengan tingkat signifikan 0,001. Nilai signifikansi kurang dari 0,05, ini menunjukkan variabel pengendalian akuntansi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Maka dapat disimpulkan H₃ diterima. Yang dapat diartikan bahwa pengendalian akuntansi berperan penting dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dengan adanya pengendalian diharapkan aparat pemerintah menggunakan sumber daya secara efektif, efisien dan ekonomis, karena pelayanan yang ekonomis, efisien dan efektif kepada masyarakat merupakan indikator kinerja instansi pemerintah daerah. Tercapainya indikator tersebut merupakan suatu prestasi yang dapat meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah yang bersangkutan dan melalui pengamatan dan pengendalian langsung yang dilakukan oleh aparat tentunya akan mampu meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah secara keseluruhan.

Semakin baik prosedur pengendalian akuntansi akan meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Jika suatu instansi pemerintah memiliki sistem akuntansi yang handal diharapkan dengan praktik yang sehat, maka informasi akuntansi yang dihasilkan dapat membantu untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah bersangkutan.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian terdahulu Herawaty (2011) yang menyimpulkan bahwa pengendalian akuntansi berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Daerah Kota Jambi. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mentari Cefrida (2014) yang menyimpulkan bahwa pengendalian akuntansi tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Daerah Kota Pekanbaru.

d. Pengaruh Ketaatan Pada Peraturan Perundangan (X₄) Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Hasil uji pengaruh ketaatan pada peraturan perundangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah menunjukkan bahwa Ketaatan pada peraturan perundangan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hal ini ditunjukkan oleh nilai probabilitas t hitung untuk variabel ketaatan pada peraturan perundangan sebesar 2,020 dengan tingkat



Juhanperak
e-issn : 2722-984X
p-issn : 2745-7761

signifikan 0,049. Nilai signifikansi lebih dari 0,05, ini menunjukkan variabel ketaatan pada peraturan perundangan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Maka dapat disimpulkan H_4 diterima.

Hal ini disebabkan oleh ketidak terkaitannya peraturan perundangan dengan akuntabilitas kinerja yang telah ditetapkan. Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah berkewajiban untuk menyusun dan melaporkan perencanaan strategik tentang program-program utama yang akan dicapai selama satu sampai lima tahun, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing instansi dan jajarannya.

Hasil penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian terdahulu Cefrida (2014) yang menunjukkan bahwa ketaatan pada peraturan perundangan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kota Pekanbaru. Dan juga hasil studi ini tidak sesuai dengan hasil studi sebelumnya yang dilakukan oleh Haspiarti (2012) dalam penelitiannya Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Pada Pemerintah Kota Parepare) yang menyatakan Ketaatan Terhadap Peraturan Perundangan tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

e. **Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Penerapan Akuntansi Sektor Publik, Pengendalian Akuntansi, dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

Secara simultan variabel independen yaitu kejelasan sasaran anggaran, penerapan akuntansi sektor publik, pengendalian akuntansi, dan ketaatan pada peraturan perundangan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hasil perhitungan tersebut dapat dilihat pada tabel V.9 yang dapat dilihat dari uji ANOVA atau F test didapat nilai F hitung sebesar 8,433 dengan tingkat signifikan 0,000. Karena probabilitas jauh lebih kecil dari 0,05. Hipotesis kelima (H_5) diterima, artinya kejelasan sasaran anggaran, penerapan akuntansi sektor publik, pengendalian akuntansi, dan ketaatan pada peraturan perundangan secara bersama-sama berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

5. **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis tentang Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Penerapan Akuntansi Sektor Publik, Pengendalian Akuntansi, dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :



Juhanperak
e-issn : 2722-984X
p-issn : 2745-7761

1. Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, dengan besarnya pengaruh sebesar 0,235. Hal ini menunjukkan semakin baik Kejelasan Sasaran Anggaran dalam menjalankan penugasan profesionalnya maka akan semakin baik Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahnya.
2. Penerapan Akuntansi Sektor Publik berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, dengan besarnya pengaruh sebesar 0,316. Hal ini menunjukkan semakin baik Penerapan Akuntansi Sektor Publik dalam menjalankan penugasan profesionalnya maka akan semakin baik Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahnya.
3. Pengendalian Akuntansi berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, dengan besarnya pengaruh sebesar 0,394. Hal ini menunjukkan semakin baik Pengendalian Akuntansi dalam menjalankan penugasan profesionalnya maka akan semakin baik Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahnya.
4. Ketaatan Pada Peraturan Perundangan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, dengan besarnya pengaruh sebesar 0,287. Hal ini menunjukkan semakin baik Ketaatan Pada Peraturan Perundangan dalam menjalankan penugasan profesionalnya maka akan semakin baik Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahnya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT senantiasa kita ucapkan, atas limpahan rahmat dan karunia serta nikmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Skripsi ini merupakan syarat untuk memperoleh gelar sarjana S-1 pada program studi Akuntansi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi. Dalam penulisan skripsi ini peneliti telah berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan hasil yang terbaik. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati peneliti mengharapakan masukan berupa kritik dan saran yang membangun dari semua pihak.

Dengan hati yang tulus ikhlas penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Ibu Ir. Hj. Elfi Indrawanis., MM. selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi.
2. Bapak Zul Ammar., SE., ME. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi, sekaligus Dosen Pembimbing I yang



Juhanperak
e-issn : 2722-984X
p-issn : 2745-7761

telah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan dan bimbingan kepada peneliti.

3. Bapak Yul Emri Yulis., SE., M.Si. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Islam Kuantan Singingi.
4. Ibu Rina Andriani., SE., M.Si. selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan dan membantu untuk kesempurnaan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Akuntansi dan Staf Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah banyak membantu dan memberikan bekal ilmu yang tidak ternilai harganya kepada peneliti selama belajar di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
6. Bapak dan Ibu yang berada pada OPD Kabupaten Kuantan Singingi sebagai responden, yang telah meluangkan waktu membantu peneliti melengkapi data-data yang dibutuhkan dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Untuk seluruh teman seperjuangan angkatan 2015 program studi Akuntansi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
8. Teristimewa untuk semua keluarga peneliti, terutama kedua orang tua. Terimakasih banyak atas semua kasih sayang dan ketulusannya selama ini. Atas semua do'a dan dukungan yang sangat berarti demi kesuksesan peneliti dan segala yang telah diberikan dengan ikhlas.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang membutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

Refrensi Buku

- Arikunto, Suharsimi. 2010. Anggaran Perusahaan. Jakarta: Rineka Cipta.*
- Bastian, Indra. 2010. Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar Edisi Ketiga. Jakarta: Erlangga.*
- Emzir. 2010. Metode Penelitian Pendidikan: Kuantitatif dan Kualitatif. Jakarta: Rajawali Pers.*
- Ghozali, Imam. 2011. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.*
- Halim, Abdul dan M. Syam Kusufi. 2013. Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.*
- Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta. ANDI*



Juhanperak
e-issn : 2722-984X
p-issn : 2745-7761

Mulyadi. 2016. Sistem Informasi Akuntansi. Jakarta: Salemba Empat.

Nafarin, M. 2013. Penganggaran Perusahaan. Edisi ketiga, Cetakan kedua, Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.

Nordiawan, Deddi dan Hertianti Ayuningtyas. 2010. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat. Edisi Kedua.

Sasongko dan Parulian. 2015. Anggaran. Jakarta: Salemba Empat.

Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Manajemen. Bandung: Penerbit Alfabeta.

Jurnal, Skripsi, Tesis dan Disertasi

Cefrida, Mentari. 2014. Pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, penerapan akuntansi sektor publik, dan ketaatan pada peraturan perundangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kota pekabaru. Skripsi. Universitas Riau, Pekanbaru.

Haspiarti. 2012. Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Pada Pemerintah Kota Parepare). Skripsi. Universitas Hasanudin. Makasar.

Herawaty, Netty. 2011. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Jambi. Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora. Volume 13, Nomor 2, Hal. 31-36. ISSN 0852-8349. Jambi, Universitas Jambi.

Kusuma ningrum, Tantriani. 2010. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. Semarang, FE UNDIP.

Lobo, Ganistyar C. (2011). Pengaruh Pengendalian Akuntansi, Pengendalian Perilaku dan Pengendalian Personal terhadap Kinerja Manajerial pada PT. Berkah Delta Bahagia di Surabaya. Undergraduate thesis, UPN "Veteran" Jatim.

Nafarin. M. 2017. Penganggaran; Edisi 1. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.



Juhanperak
e-issn : 2722-984X
p-issn : 2745-7761

- Nuraini, Yustiana Ratna. 2010. Analisis Pengaruh Return On Investmen, Fixed Assets Ratio, Firm Size dan Rate Of Growth Terhadap Debt To Equity Pada Perusahaan Manufaktur Yang Tercatat di BEI. Tesis. UNDIP. Semarang.*
- Oktiandra S. 2010. Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah, Penerapan Akuntabilitas Keuangan, dan Ketaatan pada Peraturan Perundangan pada Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Skripsi Universitas Riau, Pekanbaru.*
- Pamungkas, Bambang. 2012. Pengaruh penerapan akuntansi publik dan kualitas peraturan perundangan terhadap kualitas laporan keuangan dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Jurnal Ilmiah Volume 12, nomor 2. Sekolah Tinggi Ilmu Kesatuan, Bogor*
- Riantiarno, Reynaldi. 2011. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hulu). Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Riau.*
- Rofika. Ardianto. Pengaruh Penerapan Akuntabilitas Keuangan, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah dan Ketaatan Terhadap Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Jurnal Akuntansi, Vol 2, No 2. 2014.*
- Santoso, Urip, dan Yohanes Joni Pambelum. 2008. Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dalam Mencegah Fraud. Jurnal Administrasi Bisnis (2008), Vol.4, No.1: hal. 14–33, (ISSN:0216–1249).*
- Setiawan, Heru. 2013. Pengaruh Ukuran Perusahaan, Reputasi Auditor, Opini Audit, Profitabilitas, Solvabilitas Terhadap Audit Delay pada Perusahaan Keuangan yang Terdaftar di BEI. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.*
- Suhartono, Ehrmann dan Mochammad Solichin. 2006. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Senjangan Anggaran Instansi Pemerintah Daerah Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Pemoderasi. Simposium Nasional Akuntansi 9 Padang.*



Juhanperak
e-issn : 2722-984X
p-issn : 2745-7761

Surya Yunita. 2016. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Penerpan Akuntansi Sektor Publik, Pengendalian Akuntansi, dan Ketaatan pada Peraturan Perundang – undangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau.

Wahyuni. 2014. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Study pada SKPD Rohul. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Riau.

Yulianti, Meti. 2016. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah pada SKPD Kabupaten Kuantan Singingi. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau.

Yusganingrum, Kusnasriyanti, dan Ghozali, Imam. 2005. Analisis Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Melalui Komitmen Tujuan Anggaran dan Job Relevant Information Sebagai Variabel Intervening (Penelitian Terhadap Perusahaan Manufaktur di Indonesia). In Sinopsium Nasional Akuntansi VIII (SNA 8), 15-166 September 2005, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Permenpan Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

Website

<http://www.kuansingkab.go.id>

<http://www.mediacenter.riau.go.id>

<http://www.riauterkini.com>



Juhanperak
e-issn : 2722-984X
p-issn : 2745-7761